

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester II Tahun 2024

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen

Malang - Jawa Timur

Telp. 0341 - 399192 Fax. 0341 – 399192

e-mail : keuangan.pakabmalang@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Untuk Periode Semester II Tahun 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen

Malang - Jawa Timur

Telp. 0341 - 399192 Fax. 0341 - 399192

e-mail : keuangan.pakabmalang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Urusan Administrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepanjen, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP. 19820205.200604.1.005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kabupaten Malang	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
A.4. Basis Akuntansi.....	27
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	37
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	37
B.2. Belanja.....	38
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	43
C.1. Aset Lancar	43
C.2. Aset Tetap	45
C.3. Aset Lainnya	48
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	50
C.6. Ekuitas	51

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	51
D.2.	Beban Pegawai	52
D.3.	Beban Persediaan.....	52
D.4.	Beban Jasa	53
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	54
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	54
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	55
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	56
D.11.	Beban Lain-lain.....	56
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	56
D.13.	Pos Luar Biasa.....	57
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
E.1.	Ekuitas Awal	57
E.2.	Surplus (defisit) LO	57
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	58
E.4.	Penyesuaian Nilai Aset	58
E.4. 2	Koreksi Nilai Persediaan	58
E.4. 3	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	58
E.4. 5	Koreksi Lain-lain	58
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	59
E.6.	Ekuitas Akhir	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	60
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	60
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	60

Daftar dan Lampiran	62
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	63
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

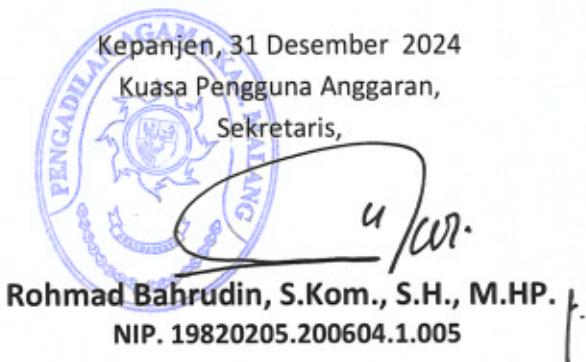
Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen - Malang - Jawa Timur

Telp. 0341 - 399192 Fax. 0341 - 399194 e-mail : keuangan.pakabmalang@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja, selama periode Semester II Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 715.574.500,- atau mencapai 82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 876.309.000,-.

Realisasi Belanja Pegawai Negara Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-

Realisasi Belanja Barang Negara Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 185.832.000,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 185.858.000,-

Realisasi Belanja Modal Negara Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 22.605.289,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 22.605.289,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,- ; Aset Lainnya (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 22.605.289,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 715.574.500,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 204.977.698,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 510.596.802,- Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp. 0, Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. 510.596.802,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dan pelaporan Semester II TA 2024. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.774.048,- dikurangi (defisit)-LO sebesar Rp. 510.596.802,- kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (506.765.561),- sehingga Ekuitas entitas Semester II pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 22.605.289,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Semester II TA 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai klasifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 serta penilaian ulang di pada Bulan Mei Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman	20

Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahanan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 715.574.500,- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode Semester II yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 715.574.500,- atau mencapai 82 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp736.611.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Semester II per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	25.980.000	19.820.000	76.29
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	282.830.000	240.125.000	84.9
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	547.499.000	455.629.500	83.22
	Total Pendapatan	876.309.000	715.574.500	81.66

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA 2024 sebesar Rp. 715.574.500.

Perbandingan realisasi PNBP Semester II TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	19.820.000	19.490.000	330.000	2
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	240.125.000	241.385.000	(1.260.000)	(1)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	455.629.500	475.736.000	(20.106.500)	(4)
	Total Pendapatan	715.574.500	736.611.000	21.036.500	(3)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
185.858.000,-

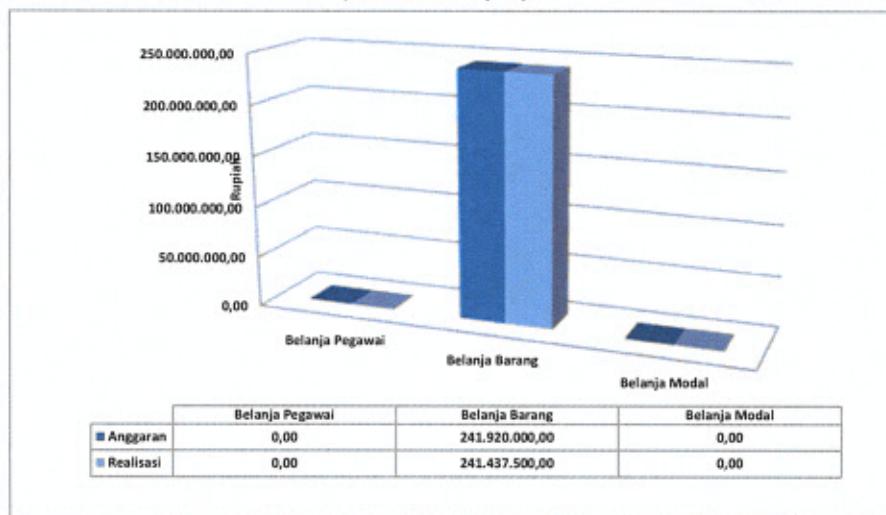
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 185.858.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	185.858.000	185.832.000	100
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	185.858.000	185.832.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	185.858.000	185.832.000	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2023

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. (20.998.000) atau sebesar (13) persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena anggaran belanja barang pada TA 2024

lebih besar dibanding TA 2023.

Perbandingan realisasi belanja Semester II TA 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	185.832.000	164.834.000	20.998.000	13
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	185.832.000	164.834.000	20.998.000	13

B.3. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja Pegawai
: Rp. 0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II TA 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak ada pagu belanja pegawai di DIPA 604731

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0

Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 185.832.000,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kabupaten Malang S Semester II TA 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 185.832.000,- dan Rp. 164.834.000,-.

Realisasi Belanja Barang Semester II per 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar (13) % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena kenaikan anggaran belanja barang pada TA 2024 mengalami kenaikan dibanding TA 2023.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	600.000	0	(100)
Belanja Barang Non Operasional	1.840.000	0	1.840.000	100
Belanja Persediaan	5.658.000	3,600,000	2.058.000	57
Belanja Jasa	99.974.000	100.000.000	(26.000)	0
Belanja Sewa	14.800.000	8.850.000	5.950.000	67
Belanja Perjalanan Dinas	62.160.000	54.520.000	7.640.000	14
Total Belanja Brutto	185.832.000	164.834.000	20.998.000	13
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	185.832.000	164.834.000	20.998.000	13

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp. 0,-*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada pagu belanja modal di DIPA 005.04.604731

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,- , Tidak ada belanja Modal Peralatan dan Mesin di DIPA 005.04.604731.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA	TA 2023	Naik (Turun)	
	2024		Rp.	%
Alat Kantor	0	0	0	0
Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
Alat Studio	0	0	0	0

Perlatan Pemancar	0	0	0	0
Komputer Unit	0	0	0	0
Peralatan Komputer	0	0	0	0
Total Belanja	0	0	0	0

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada belanja modal Gedung dan Bangunan di DIPA 005.04.604731

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Semester II per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Bangunan Gedung	0	0	0	0
Kantor Permanen				
Total Belanja	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:

Rp.

22.605.289,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.605.289,- dan Rp. 18.774.048,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 31 Desember 2024 dan TA 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar Semester II per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Persediaan	22.605.289	18.774.048
Total Aset Lancar	22.605.289	18.774.048

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	Semester II per 31 Desember TA 2024	TA 2023
1	Uang Muka dari KPPN	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	Semester II per 31 Desember TA 2024	TA 2023
1.	Persekot Gaji	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.
22.605.289,-*

Persediaan per Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.605.289,- dan Rp. 18.774.048,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Persediaan per Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023
1	Barang Konsumsi	22.605.289	18.774.048
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
	Total	22.605.289	18.774.048

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap per Semester II per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per Semester II TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Semester II TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Penggerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per Semester II TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Rincian saldo tanah per tanggal per Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	-	0	-	-	-	0
	Jumlah	0				0

Tidak ada asset tanah pada DIPA 005.04.604731.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per Semester II TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Semester II Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 0,-.

Tidak ada asset Peralatan dan Mesin di DIPA 005.04.604731.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan : Rp.
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per Semester II TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Tidak ada asset Gedung dan bangunan di DIPA 005.04.604731.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per Semester II TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Tidak asset lainnya di DIPA 005.04.604731.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan

(KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per Semester II TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik

Aset Lainnya:
Rp. 0

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :*
Rp. 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	0
	Jumlah Total	0

Paragraf di bawah akan ditambahkan secara otomatis: Saldo aset tak berwujud (ATB) per TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp. 0
Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 31 Desember 2024	0
----------------------------	---

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada asset lain-lain di DIPA 005.04.604731

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka
Pendek :
Rp. 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan per 31 Desember TA 2024 tercatat sebesar Rp. 0,-

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024	TA 2023
Uang Muka dari KPPN	0	0
Utang kepada pihak ketiga	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:*

Rp. 0

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa Beban yang masih harus dibayar. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus dibayar Semester II TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
Jumlah	0	0

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.
22.605.289,-*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.605.289,- dan Rp. 18.774.048,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
715.574.500,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 715.574.500,- dan Rp. 736.611.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik / Turun	%
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	715.574.500	736.611.000	(21.036.500)	13
	Total Pendapatan	715.574.500	736.611.000	(21.036.500)	13

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 0 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)				
Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 24.803.698,- Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.803.698,- dan 20.714.231,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	24.803.698	20.714.231	4.089.467	19.7
Total Beban Persediaan	24.803.698	20.714.231	4.089.467	19.7

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 118.014.000,- dan Rp. 109.424.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	20.714.231	4.089.0467	19.7
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Bahan	1.840.000	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	99.974.000	109.424.000	(3.394.000)	(3.08)
Beban Sewa	14.800.000	0	0	0
Beban Jasa lainnya	1.400.000	0	0	0
Total Beban Jasa	181.948.231	181.948.231	(70.787.169)	(28.08)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan : Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0

Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
62.160.000,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.160.000 dan Rp. 51.810.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	62.160.000	51.810.000	10.350.000	19
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0
	62.160.000	51.810.000	10.350.000	19

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Adri Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.774.048,- dan Rp. 20.309.089,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 510.596.802,- dan Rp. 554.662.769,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos

luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (506.765.561) dan Rp. (556.197.810) Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 September 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(856,308,500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	241,437,500
Transfer Masuk	13,770,000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	(556.197.810)

E.6.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.605.289,- dan Rp. 18.774.048,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah: Bank Rakyat Indonesia Cabang Kepanjen 651546047311000 BPG 032 PA Kab. Malang yang digunakan sebagai Penampung DIPA 005.04.604731. Rekening yang digunakan untuk penampungan biaya perkara adalah: Bank Rakyat Indonesia Cabang Kepanjen dengan nomor rekening 051601000775307 RPL 031 PA Kab Malang untuk biaya perkara yang pada 31 Desember 2024 memiliki saldo sejumlah 589.725.500,-.

F.2.4. Revisi DIPA

Sudah terjadi 2 kali revisi DIPA pada Semester 2, antara lain:

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

. Tidak ada

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

.Tidak ada

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No.	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Manfaat			
A. Peralatan dan Mesin					
1. Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0
2. Alat Kantor	5	0	0	0	0
3. Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0
4. Alat Studio	5	0	0	0	0
5. Alat Komunikasi	5	0	0	0	0
6. Peralatan Pemancar	10	0	0	0	0
7. Komputer Unit	4	0	0	0	0
8. Peralatan Komputer	4	0	0	0	0
B. Gedung dan Bangunan					
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	0	0	0
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
D. Aset Tetap Lainnya					
1. Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0	0
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan					
1. Alat Angkutan Darat Bermotor	5	0	0	0	0
2. Alat Kantor	5	0	0	0	0
3. Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0
4. Alat Studio	5	0	0	0	0
5. Alat Komunikasi	5	0	0	0	0
6. Peralatan Komputer	4	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
					0



*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*



DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.04

Data Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan Semester II TA 2024

LRA belanja dan Pengembalian Belanja Semester II TA 2024

Neraca Percobaan Basis Kas Saldo Awal

Neraca Percobaan Basis Kas Berjalan Semester II TA 2024

Neraca Percobaan Basis Akrual Saldo Awal

Neraca Percobaan Basis Akrual Berjalan Semester II TA 2024

Neraca Face Semester Semester II TA 2024

Laporan Operasional Semester Semester II TA 2024

Laporan Perubahan Ekuitas Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II TA 2024

Laporan Posisi BMN di Neraca Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud Semester II TA 2024
Semester II TA 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan Semester II TA 2024

Laporan Barang Persediaan Semester Semester II TA 2024

Catatan Ringkas Barang Milik Negara Semester II TA 2024

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga per 31 Desember TA 2024

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga per 31 Desember TA 2024

Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi 31 Desember TA 2024

Rekening Koran per 31 Desember TA 2024

Berita Acara Opname Fisik Persediaan Semester II TA 2024

Kertas Kerja Telaah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



JITERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
NI : 04
AH/PROVINSI : 0500
N KERJA : 604731
SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
JAWA TIMUR
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 31/12/24 2:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_Ira_bel_akun_sakker_poc
Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

E	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	BELANJA BARANG	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4
	Belanja Barang Non Operasional	3,000,000	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,000,000	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan	5,658,000	5,658,000	5,658,000	0	5,658,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,658,000	5,658,000	5,658,000	0	5,658,000	100	0
	Belanja Jasa	100,000,000	99,974,000	99,974,000	0	99,974,000	99,97	26,000
	Belanja Jasa Konsultant	12,800,000	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	100	0
	Belanja Sewa	2,000,000	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	114,800,000	116,200,000	116,174,000	0	116,174,000	99,98	26,000
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	62,400,000	62,160,000	62,160,000	0	62,160,000	100	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,400,000	62,160,000	62,160,000	0	62,160,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	125,200,000	124,320,000	124,320,000	0	124,320,000	99,99	26,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	185,858,000	185,858,000	185,858,000	0	185,832,000	99,99	26,000
	JUMLAH BELANJA	185,858,000	185,858,000	185,832,000	0	185,832,000	99,99	26,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NITRIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
N I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
AH/PROVINSI : 0500 JAWA TIMUR
N KERJA : 604731 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 31/12/24 2:39 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_irapen_akun_satker

E	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN 7=6/3
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO 6=4-5	
	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
2	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	20,000,000	0	0	0	0
31	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	25,980,000	19,820,000	0	19,820,000	76.29
32	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	282,830,000	240,125,000	0	240,125,000	84.9
33	Pendapatan Ongkos Perkara	547,499,000	455,629,500	0	455,629,500	83.22
39	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	876,309,000	715,574,500	0	715,574,500	81.66
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	876,309,000	715,574,500	0	715,574,500	81.66
	JUMLAH PENDAPATAN	876,309,000	715,574,500	0	715,574,500	81.66

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



NITRIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
IN I : 04 MAHKAMAH AGUNG
AH/PROVINSI : 0500 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
IN KERJA : 604731 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : KD PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 31/12/24 3:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_sakker_poc
Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

E	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
BELANJA BARANG								
Belanja Barang Non Operasional		3,000,000	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	100	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212		3,000,000	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000	100	0
Belanja Barang Persediaan								
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		5,658,000	5,658,000	5,658,000	0	5,658,000	100	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218		5,658,000	5,658,000	5,658,000	0	5,658,000	100	0
Belanja Jasa								
Belanja Jasa Konsultan		100,000,000	100,000,000	99,974,000	0	99,974,000	99,97	26,000
Belanja Sewa		12,800,000	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	100	0
Belanja Jasa Lainnya		2,000,000	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	100	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221		114,800,000	116,200,000	116,174,000	0	116,174,000	99,98	26,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		62,400,000	62,160,000	62,160,000	0	62,160,000	100	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241		62,400,000	62,160,000	62,160,000	0	62,160,000	100	0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		185,858,000	185,858,000	185,832,000	0	185,832,000	99,99	26,000
JUMLAH BELANJA		185,858,000	185,858,000	185,832,000	0	185,832,000	99,99	26,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

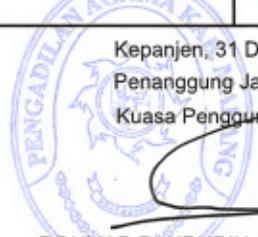
Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 31/12/2542:07 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	185,832,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	715,574,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	19,820,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	240,125,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	455,629,500
3.0	521211	Belanja Bahan	1,840,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,658,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	99,974,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	14,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,400,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,160,000	0
JUMLAH			901,406,500	901,406,500

Keterangan :

FINAL



Kepanjen, 31 Desember 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP
198202052006041005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 10:57 AM

Tgl Cetak : 31/12/24 2:06 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akhir_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,605,289	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	185,832,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	715,574,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	22,976,939
0.0	391111	Ekuitas	0	18,774,048
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	19,820,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	240,125,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	455,629,500
3.0	521211	Beban Bahan	1,840,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	99,974,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	14,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,400,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,160,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	24,803,698	0
JUMLAH			943,157,487	943,157,487

Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP 198202052006041005

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 31/12/24 2:06 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
JUMLAH ASET LANCAR	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
JUMLAH ASET	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
JUMLAH EKUITAS	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
JUMLAH EKUITAS	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41

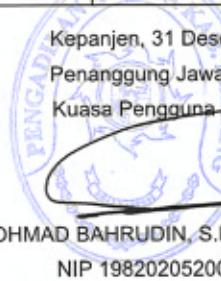
Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP 198202052006041005




LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 10:57 AM
 Tgl Cetak : 31/12/24 2:05 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	715,574,500	736,611,000	(21,036,500)	(2.856)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	715,574,500	736,611,000	(21,036,500)	(2.856)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	715,574,500	736,611,000	(21,036,500)	(2.856)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Persediaan	24,803,698	20,714,231	4,089,467	19.742
Beban Barang dan Jasa	118,014,000	109,424,000	8,590,000	7.85
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	62,160,000	51,810,000	10,350,000	19.977
Beban Barano Untuk Diserahkan Kepada Masvarakat/Pemda	0	0	0	0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 10:57 AM
 Tgl Cetak : 31/12/24 2:05 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	204,977,698	181,948,231	23,029,467	12.657
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	510,596,802	554,662,769	(44,065,967)	(7.945)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	510,596,802	554,662,769	(44,065,967)	(7.945)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	510,596,802	554,662,769	(44,065,967)	(7.945)

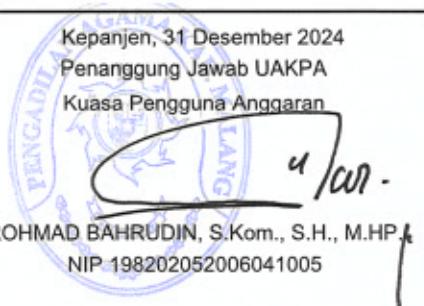
Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 31/12/24 2:05 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,774,048	20,309,089	(1,535,041)	(7.56)
SURPLUS/DEFISIT-LO	510,596,802	554,662,769	(44,065,967)	(7.94)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(506,765,561)	(556,197,810)	49,432,249	(8.89)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,831,241	(1,535,041)	5,366,282	(349.59)
EKUITAS AKHIR	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41

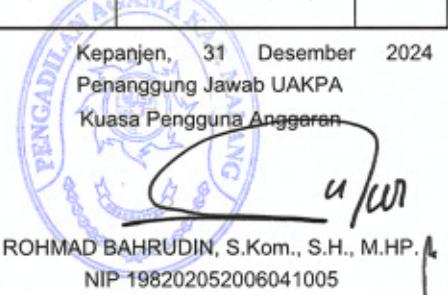
Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP 198202052006041005



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**

TERIAN/LEMBAGA N KERA	URAIAN	2024			2023			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% ANGGARAN	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7	6
apatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
apatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Japatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak	876,309,000	715,574,500	(160,734,500)	82	824,278,000	736,611,000	87,667,000	89	0	0	0	0	0
idapat Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
idapat dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
idapat BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
idapat Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	876,309,000	715,574,500	(160,734,500)	82	824,278,000	736,611,000	87,667,000	89	0	0	0	0	0
dapatkan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	876,309,000	715,574,500	(160,734,500)	82	824,278,000	736,611,000	87,667,000	89	0	0	0	0	0
Ija Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ija Pemerintah Pusat	185,858,000	185,832,000	(26,000)	100	165,800,000	164,834,000	966,000	99	0	0	0	0	0
anjia Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anjia Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tgl Data : 31/12/24 10:57 AM
Tgl Cetak : 31/12/24 2:04 PM
Halaman : 1
lap_Ira_face_satker_new_poc

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



TERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
N I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
N KERJA : PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG 604731

Tgl Data : 31/12/24 10:57 AM
 Tgl Cetak : 31/12/24 2:04 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024			2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ia Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
ia Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
ina Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
ina Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
cah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
ia Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
ia Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
ia Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
antif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Negara (B.I + B.II)	185,858,000	185,832,000	(26,000)	100	165,800,000	164,834,000	966,000	99
JAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Ian :

Kepanjen, 31 Desember 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
 NIP.198202052006041005

[Signature]





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 604731
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	185,858,000	185,858,000	0
2	Belanja	185,832,000	185,832,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	876,309,000	876,309,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	715,574,500	715,574,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 31-JAN-25



LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

: 005 : MAHKAMAH AGUNG
: 604731 : PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 31/12/24 8:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_salker_poc

SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	NILAI	NILAI
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG						
URAIAN						
	3	4	5	6	7	8
	2					
					9	10
						11



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELompOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

: 005 MAHKAMAH AGUNG
 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG
 : 604731

Tgl Data : 31/12/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 31/12/24 8:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_salker_poc

SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2								



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

: 005 : MAHKAMAH AGUNG
 : 604731 : PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM
 Tanggal : 31/12/24 8:30 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
	BERTAMBAH		BERKURANG						
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
AKUN NERACA KELOMPOK BARANG									
URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2								

KEPANJEN : 31 Desember 2024
 Penanggung Jawab UAKPB
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
er/ar

ROHMAD BAHRUDIN, S.kom., S.H., M.H.P.

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 604731 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/12/24 6:24 AM
Tanggal : 31/12/24 8:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_po

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22,605,289
Jumlah Barang Konsumsi		22,605,289
TOTAL		22,605,289

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELompok BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KPB : 604731 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG



Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ROHMAD BAHRUDIN, S.kom., S.H., M.H.P.

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I
Tingkat Satker
SEMESTER II TAHUN 2024

Kode Satker : 604731
 Nama Satker : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 Nama Eselon 1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
 Nama Kementerian : Mahkamah Agung

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face	✓		Ada
2. Neraca face	✓		Ada
3. Laporan Operasional face	✓		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas face	✓		Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
6. Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
7. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
8. Catatan atas laporan Keuangan	✓		Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"	✓		Tidak
Saldo antar Laporan			
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
4. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satker tersebut menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraianya	✓		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak Normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal" kecuali akun Beban Penyisihan Piutang	✓		Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister" <i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>	✓		Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			
Akun "Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"	✓		Tidak
2. Adakah akun "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)	✓		Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			
Akun Ekuitas (3XXXXX)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) kec. Di RRI, TVRI dan POLRI	✓		Tidak
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	✓		Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04?	✓		Tidak
Akun khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? <i>(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)</i>	✓		Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transef merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)	✓		Tidak
3. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain	✓		Tidak
4. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	✓		Tidak
5. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL	✓		Tidak
6. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan hibah)	✓		Tidak
7. Adakah akun 54xxxx(Beban bunga)	✓		Tidak
8. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)	✓		Tidak
9. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)	✓		Tidak
10. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)	✓		Tidak
<i>Selain akun-akun diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611,423252,423253,423254,423341, dll</i>			
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? <i>(misalkan pendapatan SIM/STNK/kejaksaan ternyata terdapat pada kementerian kesehatan)</i>	✓		Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan bunga lainnya di KL? <i>(seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>	✓		Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Neraca(1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?	✓		Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)	✓		Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)	✓		Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)	✓		Tidak

Hibah Langsung		
1. Adakah saldo 218211 (Hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun?	Ya	Tidak
2. Apakah saldo akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan saldo awal 2017?	✓	Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>		
3. Jika ada akun 111827 (Kas Alinnya dari Hibah Yang Belum diahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)	✓	Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)		
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp. 0	
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?		Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK dari KL lain senilai tsb.?		Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar),</i>		
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	✓	Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?	✓	Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan		
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp. 0	
2. Apakah selisih nilai diatas normal? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	✓	YA

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		
	Ada	Tidak
	Seharusnya	
1. Adakah pendapatan Perpajakan (kecuali BA.015)	✓	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah	✓	Tidak
3. Adakah beban bunga	✓	Tidak
4. Adakah beban subsidi	✓	Tidak
5. Adakah beban hibah	✓	Tidak
6. Adakah beban transfer	✓	Tidak
7. Adakah beban lain-lain	✓	Tidak
Pengecekan saldo Normal		
	Ada	Tidak
	Seharusnya	
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya	✓	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif?	✓	Ya
<i>Seluruh akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada kegiatan operasional, non operasional maupun Pos Luar Biasa) kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai positif)</i>		
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (jk.pendek dan jl.panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (jk.pendek dan jk.panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	✓	Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>		

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"	✓		Ada
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? <i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset Tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>		✓	Ada/Tidak
			Ya
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrual), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya

NERACA

Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
2. Adakah pos "Belum Dregister"?		✓	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		✓	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2019, Apakah demikian?	✓		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		Tidak	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan Persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	✓		Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	✓		Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:	✓		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL	✓		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas?			Ya
6. Adakah beban bansos?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas?			Ya

Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x)?		✓	Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca?		✓	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141)?		✓	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		✓	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)?	✓		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN? <i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>	✓		Ya
2. Apakah menurut e-rekon-lk terdapat Jurnal Tidak Lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK? <i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? Lakukan pengecekan</i>		✓	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)		✓	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK? (<i>Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi</i>) atas seluruh jenis TDK baik pada satker DIPA aktif maupun tidak aktif?		✓	Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang.
Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnnya

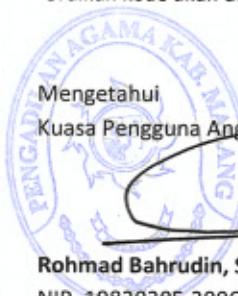
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-taun lalu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname persediaan?	✓		Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja persediaan?		✓	Tidak
3. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)?	✓		Ya
4. Adakah PNBP digunakan langsung?		Tidak	Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	✓		Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	✓		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca?	✓		Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?	✓		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang "TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP. 19820205.200604.1.005

Kepanjen, 31 Desember 2024

Penelaah,

BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.
NIP. 19750404 200912 1 002

MONITORING PENUTUPAN REKENING SATKER PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SEMESTER II TAHUN 2024

NO	NAMA SATKER	K/L	BA-ES1	Jenis Rek	Nomor Rekening	NAMA REKENING	NAMA BANK	SURAT IJIN PENUTUPAN/KETERA NGAN DARI BANK/SURAT KET DARI SATKER	ALASAN PENUTUPAN
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	005	04						

Kepanjen , 31 Desember 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Rohmad Bahrudin.

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 198205.200604.1.005